

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kemiskinan absolut ditandai oleh tingkat pendapatan si miskin yang berada digaris kemiskinan. Kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan di Kecamatan Sungai Kakap, berdimensi pada kekurangan bahan keperluan asasi, seperti; kekurangan makanan, pakaian dan kediaman, serta keadaan ekonomi, di mana tidak mempunyai modal ataupun daya pengeluaran yang dapat menjamin hidupnya atau memenuhi kebutuhan melautnya.

Kebijakan nasional tentang motorisasi dan modernisasi peralatan tangkap ikan menjelang tahun 70-an, ternyata cukup membantu masyarakat nelayan di Kecamatan Sungai Kakap menuju perkembangan dunia perikanan. Berdasarkan Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, khususnya dari Bidang Perikanan Tangkap (Tahun 2014), menyebutkan:

Modernisasi perikanan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas perikanan tangkap khususnya di desa-desa nelayan. Kegiatan perikanan rakyat mulai berkembang ketika diberlakukannya motorisasi perahu. Alasannya, karena berimplikasi pada daya jangkau operasi nelayan-nelayan kecil yang tidak lagi sebatas di perairan tepi pantai, tetapi sudah meluas dengan menjangkau perairan lepas pantai (Lakip Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, 2014:32).

Kemajuan teknologi dalam hal motorisasi termasuk perahu, secara umum dinilai telah memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perikanan tangkap, namun dibalik itu semua bahwa berkenaan dengan penggunaan motorisasi sebagai sarana penangkapan juga berimplikasi pada

konsekuensi nilai ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM telah menjadi primadona dan keberadaannya mesti tersedia guna memenuhi aktivitas nelayan kapal motor untuk dapat melaut dan mencari ikan. Jika ditinjau dari segi operasionalnya berarti keberadaan BBM kini menjadi komponen penting menempati urutan pertama dalam sistem produksi nelayan motorisasi, sehingga jauh-jauh hari sebelumnya para nelayan motorisasi harus menyediakan modal awal yang tergolong besar dalam pemenuhan kebutuhan akan BBM, di samping fasilitas penunjang lainnya.

Ketergantungan nelayan terhadap motorisasi dinilai tidak begitu menjadi masalah sekiranya ketersediaan akan BBM dapat terpenuhi. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa meningkatnya harga BBM khususnya BBM jenis solar yang melambung tinggi, yaitu Rp 6.400 perliter melalui kebijakan pemerintah, ternyata telah dan semakin menciptakan permasalahan baru bagi para nelayan tradisional yang menggunakan motorisasi. Sulitnya mendapatkan solar bersubsidi menjadikan nelayan tradisional terpaksa mendapatkan solar dari pengecer dengan kisaran harga sekitar Rp 7.000 hingga Rp 7.500 perliter (Data Januari 2015).

Berdasarkan harga BBM jenis solar tersebut menjadikan modal awal (*stock capital*) nelayan tradisional mengalami pembengkakan, jika dibandingkan dengan hasil tangkapan yang belum pasti, karena rata-rata keperluan yang diperlukan nelayan tradisional dalam sekali melaut (jenis motor tempel dan jenis kapal motor 0-5 GT—*Gross Ton*), minimal 20 liter

solar. Jadi, nelayan tradisional dalam memenuhi keperluan melaut ini harus mengeluarkan biaya BBM jenis solar (harga normal) sebesar Rp 128.000 belum termasuk untuk penggantian suku cadang (*spare part*) sebagai komponen habis pakai.

Beberapa nelayan tradisional di Kecamatan Sungai Kakap sebagaimana obeservasi awal mengakui, bahwa setidaknya untuk sekali melaut harus mempersiapkan modal sekitar Rp 250.000 untuk keperluan BBM jenis solar, perawatan suku cadang motor maupun biaya perawatan alat tangkap. Nelayan tradisional akan mengalami keuntungan manakala dalam sekali melaut dapat menutupi biaya operasional melautnya, karena bisa mengejar keuntungan bersih. Sebaliknya, manakala mengalami kerugian maka sangat mempengaruhi proses operasional selanjutnya, sehingga para nelayan berpikir untuk kedua kalinya ketika hendak turun melaut.

Kondisi faktual berkenaan untung dan rugi melaut tersebut bagi nelayan bukan merupakan masalah baru, karena hal ini telah menjadi permasalahan umum yang kerap kali dihadapi, bahkan mungkin sebagai kendala sebagian besar nelayan di wilayah pesisir Indonesia, terutama sejak diberlakukan pemotongan subsidi BBM—berujung pada kenaikan harga BBM—pada tiga tahun terakhir dan dalam waktu dekat kedepan. Tidak jarang atas persoalan itu, menjadikannya nelayan terpaksa mengambil sikap berhenti melaut sebagai dampak keterbatasan atas daya beli atas pada harga BBM, terutama solar.

Persoalan yang melanda di sektor perikanan tangkap ini kerap kali dijumpai di wilayah Kalimantan Barat. Kondisi ini jelas mengundang keprihatinan, karena Kalimantan Barat memiliki potensi cukup besar dari sisi perikanan dan sebagai pusat ketergantungan hidup bagi para nelayan yang umumnya berdomisili di daerah pesisir. Tidak terkecuali Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu wilayah yang terletak di pesisir Kalimantan Barat, dan tergolong menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan pada Senin, 5 Januari 2015 lalu, diperoleh informasi bahwa ditemui hampir 80 persen nelayan kapal motor Kecamatan Sungai Kakap terpaksa berhenti melaut. Alasannya mendasar adalah membengkaknya biaya operasional melaut, bahkan kondisinya semakin terancam sejalan kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan kembali harga BBM khususnya solar.

Kecamatan Sungai Kakap sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, tahun 2014 bahwa sebagai salah satu daerah penghasil ikan yang potensial dan ditaksir mencapai 3.993,60 ton setahun, kiranya wajar jika dikenal sebagai penyuplai kebutuhan akan ikan segar untuk masyarakat kota Pontianak, karena lokasi Kecamatan Sungai Kakap relatif dekat dengan Kota Pontianak, yaitu berjarak tempuhnya sekitar 22 Km.

Sebagai gambaran awal Kecamatan Sungai Kakap memiliki 7 desa (dari 12 desa) yang sebagian besar penduduknya memilih bekerja di sektor perikanan tangkap, yaitu; Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Kupah, Desa

Sungai Rengas, Desa Sungai Belidak, Desa Punggur Kecil, Desa Tanjung Saleh dan Desa Sepok Laut dengan kapasitas jumlah rumah tangga nelayan motorisasi sebanyak 345 RTP (Rumah Tangga Pemilik). Perinciannya: RTP jenis motor tempel sebanyak 183 buah, RTP jenis kapal motor 0-5 GT sebanyak 123 buah dan RTP jenis kapal motor diatas 5GT sebanyak 39 buah (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya, tahun 2014).

Dasar penentuan Desa Sungai Kakap sebagai lokasi penelitian, karena secara umum pekerjaan masyarakatnya lebih dominan sebagai nelayan dibanding enam desa lainnya yang lebih memilih pekerjaan yang bervariasi. Di desa ini terlihat masyarakatnya sangat merasakan dampak yang mengkhawatirkan manakala dalam waktu dekat BBM khususnya solar akan mengalami kenaikan kembali. Alasan lainnya karena masyarakat Desa Sungai Kakap memiliki nelayan motorisasi paling besar dan paling bervariasi manakala diukur dari tingkat kepemilikan RTP, yakni; sebanyak 242 RTP dengan rincian armada penangkapan sebesar 54 unit perahu mesin kecil, 49 unit kapal motor 0-5 GT, 139 unit kapal motor di atas 5 GT (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, tahun 2014).

Berdasarkan gambaran dimaksud cukuplah rentan manakala menilai masyarakat nelayan motorisasi, melalui indikator kepemilikan kapal motor di atas 5 GT saja, dan ditaksir membutuhkan ketersediaan BBM setidaknya sebesar 1-3 ton per trip yang mesti sejalan dengan ketersediaan modal awal. Hal inilah yang menjadi penyebab sehingga banyak kapal motor diatas 5 GT terpaksa memilih berhenti untuk tidak melaut.

Di sisi lain bahwa pemilik kapal motor ukuran di bawah 5 GT sebagaimana hasil pengamatan yang masih memilih melaut atau tetap beroperasi, itu pun harus dengan konsekuensi bahwa hasil tangkapannya harus diserahkan kepada *tauke* yang telah membantu biaya operasional melautnya. Maknanya bahwa kehidupan nelayan tergantung pada “kebijakan” *tauke* berikut jenis dan banyaknya hasil tangkapan, dan itu sama sekali semakin menjauhkan kemandirian nelayan dari sejahtera.

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, judul penelitian yang diajukan adalah: Strategi Nelayan Kapal Motor dalam Menghadapi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Solar di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Mengingat keberadaan nelayan kapal motor (baik dalam usaha besar maupun skala kecil) selalu melibatkan beberapa pihak yang ikut berkepentingan. Kehadiran *tauke* sangat mempengaruhi kehidupan nelayan, dan sebagai pihak yang kerap kali diuntungkan, akibat kesulitan hidup maupun keterdesakan melaut nelayan, atas keterjangkauannya pada BBM khususnya solar.

1.2. Fokus Penelitian

Guna menjaga konsistensi dalam penelitian maka fokus penelitian adalah nelayan motorisasi di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang dinilai konsisten dalam melakukan aktivitas utamanya, yakni melaut terkait ketergantungannya pada tersedianya BBM khususnya jenis solar. Pengertian nelayan motorisasi adalah nelayan modern dan semi modern yang menggunakan mesin penggerak dalam menunjang aktivitas melaut.

Makna nelayan semi modern dapat diartikan sebagai nelayan pengguna sampan atau perahu motor ukuran kecil dengan kapasitas mesin berdaya tarik kecil, seperti; jenis perahu tempel (perahu TS) dengan mesin motor tipe kecil seperti; *robin* (Lakip Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, 2014:17). Nelayan semi modern biasa dikenal sebagai nelayan lepas, yaitu menjalankan sendiri usahanya. Perihal nelayan modern, yaitu nelayan yang menggunakan perahu maupun kapal bermotor dengan daya tarik besar, yaitu; 100 PK dengan ukuran mesin 4 hingga 6 silinder, berkapasitas daya muat diatas 3 GT (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.29/MEN/2003 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan).

1.3. Rumusan Masalah

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM solar, yaitu mencapai Rp 7.250 perliter dan kembali melakukan penurunan harga pada pertengahan Januari 2015 sebesar Rp 850 perliter menjadi Rp 6.400 perliter, masih dirasakan memberatkan masyarakat, dan menjadi permasalahan pelik bagi keluarga nelayan Sungai Kakap yang umumnya mengandalkan aktivitas pekerjaannya pada perikanan tangkap dengan menggunakan motor berkapasitas besar dan memerlukan persediaan BBM solar dalam jumlah besar pula demi rutinitas melautnya.

Berbagai bentuk adaptasi harus dilakukan oleh para nelayan untuk tetap bertahan hidup, meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki, baik dalam hal sumberdaya manusianya maupun dalam hal ketersediaan

dana. Beranjak dari permasalahan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu: “Bagaimana strategi nelayan kapal motor dalam menghadapi kenaikan harga BBM solar?”

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian mengenai strategi nelayan kapal motor dalam menghadapi kenaikan harga BBM solar di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

- a. Ingin mengungkapkan strategi nelayan kapal motor dalam menjalani pekerjaan utama.
- b. Ingin mengungkapkan strategi nelayan kapal motor dalam menjalani pekerjaan sampingan di saat tidak melaut.

1.5. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menentukan langkah-langkah kebijaksanaan, khususnya terhadap penanganan dampak kenaikan harga BBM dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan bentuk adaptasi nelayan kapal motor dalam menghadapi kenaikan harga BBM, sebagai bentuk pengembangan teori sosiologi sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan kondisi sosiologis nelayan.
- c. Dapat menjadi refleksi awal dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka menentukan kebijakan terkait masalah BBM berikutnya.